

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN PLAOSAN KELURAHAN PLAOSAN Jalan Raya Sarangan Telepon 0351-888228

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN NOMOR: 188/ 26 /KEPT/188/403.407.1/ 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR LURAH PLAOSAN

LURAH PLAOSAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapakan Standar Pelayanan;
- bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan legalisasi Surat-Surat dengan Keputusan Lurah Plaosan;

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;





- Ģ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI
- Þ Tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Nomor 53 Tahun 2010;
- Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 129, Tambahan Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Tentang Pelayanan Publik.
- <u>.</u>.. Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Lembaran Negara Nomor 3866);
- ~ 63/KEP/M.PAN/7/2003 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Pelayanan Publik; tentang Pedoman Umum
- Pemerintah; KEP/25/M.PAN/2/2004 Keputusan Menteri Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Kepuasan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Masyarakat tentang Pedoman Umum Penyusunan Unit Pelayanan Instansi
- 3 dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
- <u>,</u> Propinsi Jawa Timur; Perda Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
- 0 Publik di Propinsi Jawa Timur; Pelaksanaan Perda Nomor : 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Pergub. Jawa Timur Nomor: 14 tahun 2006 tentang Petunjuk

MEMUTUSKAN:

PERTAMA Menetapkan

Standar Pelayanan pada Kelurahan

Plaosan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

ruang lingkup pelayanan: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan Plaosan meliputi

- ë barang
- O Jasa, dan
- S Administratif

KETIGA wajib dilaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini penyelenggaraan pelayanan publik. penyelenggara, acuan dalam penilaian aparat pengawasan, oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai kinerja pelayanan dan masyarakat dalam oleh pimpinan

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana mestinya. terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki apabila dengan

Ditetapkan di : Plaosan

Pada tanggal : Ir Oktober 2020

LURAH PLAOSAN

Penata NIP 19670224199202 1 001

SUDIHARTO, S Sos